

# LAPORAN KINERJA 2021

Asisten Deputi Standardisasi dan  
Infrastruktur Pemuda



Deputi Bidang Pengembangan Pemuda  
Kementerian Pemuda dan Olahraga



**SIP** DIHATI

## KATA PENGANTAR

### Asisten Deputy Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Asisten Deputy Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda tahun 2021, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.


Laporan Kinerja Asisten Deputy Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Asisten Deputy Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda menyampaikan Laporan Kinerja sebagai bagian dari pertanggungjawaban kinerja kepada pimpinan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan seluruh *stakeholders* yang berkepentingan, baik Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Laporan Kinerja Asisten Deputy Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda merupakan perwujudan daya dan upaya untuk memperbaiki guna meningkatkan kinerja secara berkesinambungan, meliputi identifikasi peluang dan masukan kegiatan yang sudah maupun yang belum dilaksanakan untuk perbaikan kinerja pada masa tahun berikutnya.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dan keberhasilan semua program, kegiatan, serta penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 Asisten Deputy Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda Tahun 2021.

Jakarta, Januari 2022

Asisten Deputy Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda

  
Andi Susanto

## DAFTAR ISI

### Laporan Kinerja 2021

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
BAB 1.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Struktur Organisasi.....	6
1.3 Aspek Strategis.....	9
1.4 Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> ).....	10
BAB II.....	11
2.1 Rencana Strategis.....	11
2.2 Perjanjian Kinerja .....	12
2.3 Pengukuran Kinerja .....	15
BAB III.....	18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	18
3.1.1 Indikator Kinerja 1.....	20
3.1.2 Indikator Kinerja 2.....	23
3.1.3 Indikator Kinerja 3.....	30
3.1.4 Analisis Efisiensi Sumber Daya .....	33
3.2 Realisasi Anggaran .....	36
BAB IV .....	38
4.1 Kesimpulan.....	38
4.2 Kendala dan Permasalahan .....	39
4.3 Pemecahan Masalah dan Upaya Perbaikan .....	40
LAMPIRAN.....	41

---

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda sebagai penyelenggara pemerintahan, mempunyai peran penting dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dalam hal penyediaan dan fasilitasi sarana prasarana kepemudaan. Dalam mendukung program kerja dalam bidang kepemudaan, turut dilaksanakan kegiatan standardisasi bidang kepemudaan. Sasaran Program/ Kegiatan pada Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda adalah **“Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur kepemudaan serta tersusunnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Kepemudaan”**, sehingga indikator ketercapaian target dari sasaran program sebagai berikut:

1. Jumlah kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Kepemudaan yang tersusun telah tercapai sebesar 100% dari target 2 Dokumen berupa Standardisasi Paskibraka dan Standardisasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan.
2. Jumlah Lembaga Penerima Bantuan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan telah tercapai sebesar 100% dari target 93 Lembaga berupa Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
3. Koordinasi para pemangku kepentingan bidang standardisasi serta sarana dan prasarana kepemudaan telah tercapai sebesar 100% dari target 34 Provinsi berupa Penyusunan direktori sarana dan prasarana kepemudaan.

Tabel 1. Capaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI CAPAIAN TARGET	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI PAGU ANGGARAN	%
Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur kepemudaan serta tersusunnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Kepemudaan	Jumlah Kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Kepemudaan yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Rp946.165.000	Rp944.891.000	99,87%
	Jumlah Lembaga Penerima Bantuan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan	93 Lembaga	93 Lembaga	100%	Rp10.796.310.000	Rp10.793.464.000	99,97%
	Koordinasi para pemangku kepentingan bidang standarisasi serta sarana dan prasarana kepemudaan	34 Provinsi	34 Provinsi	100%	Rp357.525.000	Rp356.207.000	99,63%

Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda selama pelaksanaan tugas tahun anggaran 2021, telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang sudah dibuat, kinerja Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda seluruh sasaran program/ kegiatan mencapai **100 %** . Anggaran yang dialokasikan kepada Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda sebanyak **Rp. 12.100.000.000,- (Dua Belas Miliar Seratus Juta Rupiah)** dan terserap sebanyak **Rp. 12.094.562.000,- (Dua Belas Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)** atau **99,96%** .

---

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) ini merupakan salah satu komponen dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan bagian dari upaya pemerintah pada umumnya dan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda serta Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda khususnya untuk ikut mendorong terwujudnya *good governance*. Oleh karena itu penyusunan Laporan Kinerja tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan anggaran berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) tahun 2021. Laporan Kinerja ini memiliki dua fungsi utama, pertama sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang berkepentingan. Kedua, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dimaksud, Laporan Kinerja Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kinerja yang telah diwujudkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara akurat, relevan, transparan dan akuntabel.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 mengategorikan pemuda sebagai warga negara berusia 16 hingga 30 tahun. Hampir seperempat dari jumlah penduduk Indonesia pada merupakan pemuda. Investasi pada peningkatan kualitas pemuda merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Setiap rupiah anggaran pemerintah, baik yang dipergunakan oleh jajaran pemerintah pusat maupun daerah harus jelas *output-outcome* dan manfaat atau dampak positifnya untuk sebesar-besarnya kualitas dan daya saing pemuda. Untuk memantau kemajuan pembangunan pemuda yang dihasilkan dari investasi ini, perlu ada Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang diperbarui secara berkala. Oleh karena itu saat ini dan kedepan kami sudah memulai merencanakan suatu program berdasarkan data-data yang sudah ada terutama data pada Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sehingga hasil yang dicapai bisa lebih terukur dan memiliki dampak yang cukup baik.

## 1.2 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga menyebutkan Asisten Deputi 4/II terdiri atas:

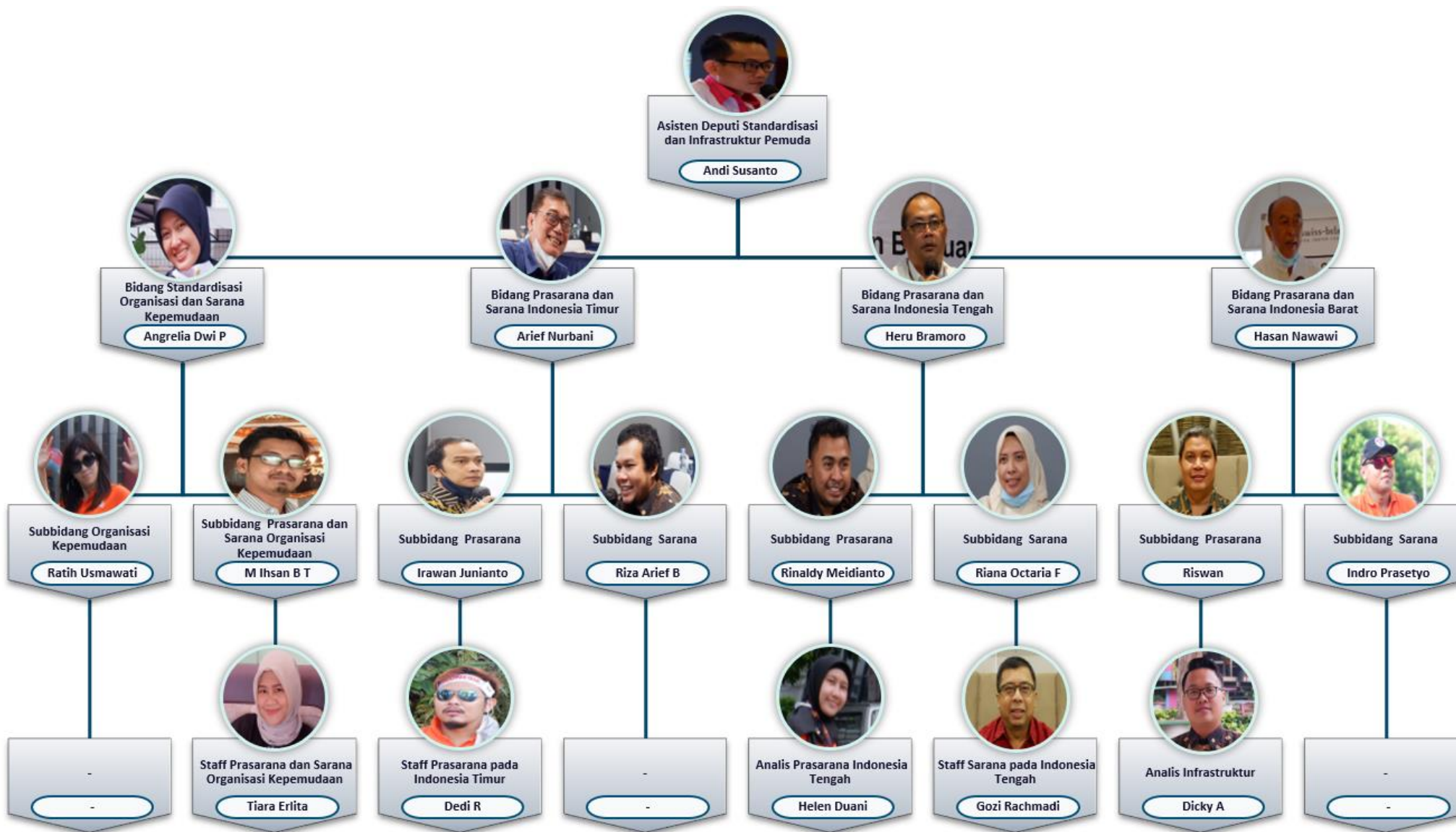
1. Bidang Standardisasi Organisasi dan Sarana Kepemudaan terdiri atas:
  - Sub bidang Organisasi Kepemudaan; dan
  - Subbidang Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
2. Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Timur terdiri atas:
  - Sub Bidang Prasarana; dan
  - Sub Bidang Sarana.
3. Bidang Prasarana Dan Sarana Indonesia Tengah terdiri atas:
  - Sub Bidang Prasarana; dan
  - Sub Bidang Sarana.
4. Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Barat terdiri atas:
  - Sub Bidang Prasarana; dan
  - Sub Bidang Sarana.

Kondisi saat ini, Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda memiliki jumlah pegawai sebanyak 18 (delapan belas) orang, yang idealnya sebanyak 21 (dua puluh satu) orang. Kondisi kepegawaian sebagaimana tersebut diatas dan struktur organisasi dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

**Tabel 2. Jumlah Pegawai**

Eselon	Jumlah	Kekurangan
II	1	0
III	4	0
IV	8	0
Pelaksana	5	3
Jumlah	18	3





Gambar 1 .Struktur Organisasi Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda



**Tabel 3. Daftar Nama Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda**

NO	NAMA	GOLONGAN	JABATAN
1	Andi Susanto, S.STP, M.Sc	IV/C	Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda
2	Hasan Nawawi, S.H	IV/B	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Barat
3	Heru Bramoro, S.T, M.M	IV/B	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Tengah
4	Arief Nurbani Siswoyo, S.Pd, M.Si	IV/B	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Timur
5	Angrelia Dwi Pramestisari, S.E	IV/A	Kepala Bidang Standardisasi Organisasi dan Sarana Kepemudaan
6	Riswan, S.E., M.M.	III/C	Kepala Subbidang Prasarana pada Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Barat
7	Indro Prasetyo, ST, MT	IV/A	Kepala Subbidang Sarana pada Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Barat
8	Rinaldy Meidianto, S.I.A., M.M	III/D	Kepala Subbidang Prasarana pada Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Tengah
9	Riana Octaria Fasha, S.Pd, M.Pd	III/D	Kepala Subbidang Sarana pada Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Tengah
10	Irawan Junianto, S.E., M.Ak	III/C	Kepala Subbidang Prasarana pada Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Timur
11	Riza Arief Bijaksana, S.Psi	III/C	Kepala Subbidang Sarana pada Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Timur
12	M. Ihsan B. Tjenreng, S.Kom	III/D	Kepala Subbidang Prasarana dan Sarana Organisasi Kepemudaan
13	Ratih Usmawati, S.E., M.M	III/C	Kepala Subbidang Organisasi Kepemudaan
14	Dicky Andriansyah, S.T	III/A	Analisis Infrastruktur pada Subbidang Prasarana Indonesia Barat
15	Helen Duani, S.T	III/A	Analisis Prasarana Indonesia Tengah pada Subbidang Prasarana Indonesia Tengah
16	Gozi Rachmadi	Honor Lembaga	Staff Sarana pada Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Tengah
17	Dedi Rachmansyah	Honor Lembaga	Staff Prasarana pada Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Timur
18	Tiara Erlita	Honor Lembaga	Staff Prasarana dan Sarana Organisasi Kepemudaan pada Subbidang Prasarana dan Sarana Organisasi Kepemudaan

### 1.3 Aspek Strategis

Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/II, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu sebagai berikut:

1. Kedudukan

Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda dipimpin oleh Eselon II berada dibawah dari Unit Eselon I Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.

2. Tugas:

Melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur pemuda.

3. Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standardisasi dan infrastruktur pemuda;
- b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur pemuda;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan infrastruktur pemuda;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan infrastruktur pemuda; dan
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur pemuda.

Selain itu juga Upaya peningkatan kualitas pemuda Indonesia perlu dilakukan oleh semua pihak termasuk Kementerian dan Lembaga dalam rangka menyiapkan pemuda Indonesia yang unggul dan berdaya saing menuju datangnya bonus demografi dimasa yang akan datang. Pemuda yang unggul dan berdaya saing akan memberikan bonus positif bagi kemajuan Indonesia.

---

Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda yang merupakan organ penting dari Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki posisi strategis dalam upaya pengembangan pemuda dan pelayanan kepemudaan secara umum. Kami mempunyai peran untuk mendukung dan melengkapi tugas dari unit kerja yang menangani urusan kepemudaan dalam hal infrastruktur kepemudaan dan standardisasi bidang kepemudaan. Hal ini menjadikan kami perlu berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait agar tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

#### 1.4 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda bersifat strategis serta lebih menuju kearah perumusan kebijakan dan standardisasi kepemudaan. Selain itu, saat ini peran fasilitasi bidang sarana dan prasarana kepemudaan masih sangat minim dikarenakan terbatasnya anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga maka diperlukan kontribusi dan penguatan koordinasi lintas sektor dari kementerian terkait yang bersentuhan dengan kepemudaan. Peran pemerintah daerah dan pihak swasta juga sangat diperlukan dalam pengembangan infrastruktur kepemudaan yang layak serta terstandardisasi. Keberagaman kondisi, budaya serta adaptasi dengan keadaan terkini juga menjadi tantangan tersendiri. Perbedaan pemuda di jaman sekarang ini tentu sangat berbeda dengan pemuda jaman sebelum reformasi, kemajuan teknologi dan kreativitas pemuda sekarang perlu disikapi dengan serius sehingga peluang dan kemajuan ini bisa menjadikan pemuda ke arah yang positif.

Beberapa catatan penting lainnya terkait dengan permasalahan utama pada lingkup organisasi maupun upaya peningkatan layanan kepemudaan, antara lain :

1. Belum adanya *database* sarana dan prasarana kepemudaan Indonesia.
2. Koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga masih perlu ditingkatkan.
3. Belum memiliki *Grand Design* Kepemudaan.
4. Masih belumnya tepat sasaran fasilitasi bantuan kepemudaan.
5. *Output* kegiatan yang dilaksanakan masih belum sinkron dengan *Outcome* Standardisasi dan Infrastruktur pemuda yang mengacu pada Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

---

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga disusun sebagai tugas dan fungsi Kemenpora diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemenpora mempunyai tugas: menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut untuk mendukung tercapainya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Tujuan strategis Kemenpora adalah *“Terwujudnya pemuda berkualitas yang berideologi Pancasila”* dengan sasaran strategis 1) Meningkatnya kualitas pembangunan Pemuda Indonesia yang berideologi Pancasila 2) Meningkatnya kemandirian pemuda. Hal ini tertuang dalam rencana strategis Kemenpora 2020-2024, melalui Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda diharapkan program kepemudaan dalam pembangunan karakter dan kemandirian dilakukan melalui strategi, sebagai berikut:

1. Membentuk Sentra Pemberdayaan Pemuda (SPP) di kabupaten/kota, provinsi dan nasional;
2. Membangun *enabling environment* (lingkungan yang mendukung) dan sarana prasarana fasilitas umum yang *accessible* bagi seluruh pemuda, termasuk para pemuda tuli dan penyandang *disabilitas* lainnya secara menyeluruh dan berjenjang.

Arah kebijakan dan strategi ini berguna untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemenpora. Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda mempunyai peran penting dalam mendukung program kerja dari unit kerja lainnya demi mencapai tujuan dan sasaran di bidang kepemudaan serta meningkatkan nilai IPP sebagai indikator pelayanan kepemudaan yang ada. Sasaran yang akan dicapai adalah *“Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur dalam mendukung pelayanan kepemudaan dan standar nasional kepemudaan”*. Untuk itu dalam perencanaan program didasarkan data yang ada dan hasil dari IPP sehingga program yang dijalankan tepat sasaran. Dua hal utama yang ada pada

Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda adalah kebijakan standardisasi di bidang kepemudaan dan Sarana dan Prasarana Kepemudaan yang distandardisasi. Hal ini diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor serta penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah dan sektor swasta demi tercapainya tujuan dan sasaran tersebut.

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang menyatakan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2021, Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda Tahun 2021 telah ditandatangani pada Maret 2021 yang memuat indikator keberhasilan untuk Standardisasi dan Infrastruktur pemuda sebagaimana Tabel 4.

**Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kinerja**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1	Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur kepemudaan serta tersusunnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Kepemudaan	Jumlah kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Kepemudaan yang tersusun	2 Dokumen
		Jumlah Lembaga Penerima Bantuan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan	93 Lembaga
		Koordinasi para pemangku kepentingan bidang standardisasi serta sarana dan prasarana kepemudaan	34 Provinsi



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Susanto, S.STP., M.Sc.  
Jabatan : Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.  
Jabatan : Deputi Bidang Pengembangan Pemuda,  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Melakukan monitoring evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Andi Susanto, S.STP., M.Sc.





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemanfaatan infrastruktur kepemudaan serta tersusunnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Kepemudaan	Jumlah kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Kepemudaan yang tersusun	2 Dokumen
		Jumlah Lembaga Penerima Bantuan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan	93 Lembaga
		Koordinasi Para Pemangku Kepentingan Bidang Standardisasi serta Sarana dan Prasarana Kepemudaan	34 Provinsi

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
Pengembangan Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda	Rp. 15.000.000.000,-

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda,

  
Dr. H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Jakarta, Maret 2021  
Asisten Deputi Standardisasi dan  
Infrastruktur Pemuda,

  
Andi Susanto, S.STP., M.Sc.

Gambar 2. Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda

## 2.3 Pengukuran Kinerja

Pencapaian Kinerja Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda tercermin dari Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh dari serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi Indikator Kinerja dari Sasaran Kegiatan (SK) yang diperoleh. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, maka diperoleh data capaian SK melalui Indikator Kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) menganut prinsip SMART-C yang merupakan singkatan dari *specific, measurable, agreeable, realistic, time-bounded, dan continuously improved*.

1. **Specific:** mampu menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai serta mendorong kinerja suatu unit/pegawai.
2. **Measurable:** mampu diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya. Pernyataan IKU seharusnya menunjukkan satuan pengukurannya.
3. **Agreeable:** disepakati oleh pemilik IKU dan atasannya.
4. **Realistic:** merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang.
5. **Time-bounded:** memiliki batas waktu pencapaian.
6. **Continuously Improved:** kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

Suatu IKU dianggap telah memenuhi kriteria SMART-C berdasarkan kesepakatan antara pengelola kinerja organisasi, pemilik IKU dan atasan langsung pemilik IKU

Penghitungan capaian kinerja, dilaksanakan dengan mempertimbangkan bobot dan nilai kualitas yang berdasarkan atas nilai Tingkat Validitas dan Tingkat Kendali, dimana penetapannya terdapat dalam Manual Indikator Kinerja. Validitas IKU ditentukan berdasarkan level kedekatan (representasi) pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap pencapaian SK. Pembagian level validitas IKU adalah sebagai berikut:

1. **Exact:** IKU yang mengukur secara langsung keberhasilan pencapaian SK. Pencapaian IKU (metode pengukurannya) telah merepresentasikan pencapaian SK secara keseluruhan dan umumnya mengukur output atau outcome pada suatu unit.
2. **Proxy:** IKU yang mengukur secara tidak langsung keberhasilan pencapaian SK. Pencapaian IKU (metode pengukurannya) hanya merepresentasikan sebagian pencapaian SK dan umumnya IKU hanya mengukur proses yang dilakukan oleh suatu unit.



- 
3. **Activity:** IKU yang pada umumnya mengukur input dari kegiatan pada suatu unit yang masih jauh keterkaitannya dengan keberhasilan pencapaian SK.

Tingkat kendali atas IKU ditentukan berdasarkan kemampuan suatu unit/pegawai dalam mengontrol/mengelola pencapaian target IKU:

1. **High:** Pencapaian target IKU dipengaruhi secara dominan oleh pemilik IKU.
2. **Moderate:** Pencapaian target IKU dipengaruhi secara berimbang oleh pemilik IKU dan pihak selain pemilik IKU.
3. **Low:** Pencapaian target dipengaruhi secara dominan oleh pihak selain pemilik IKU.

Target IKU adalah standar minimal pencapaian kinerja berbasis yang ditetapkan untuk periode tertentu. Penetapan target IKU merupakan kesepakatan antara atasan dan bawahan serta mempertimbangkan usulan pengelola kinerja organisasi. Ketentuan penetapan target IKU sebagai berikut:

1. Ukuran kuantitatif, apabila target IKU bersifat kualitatif, maka harus dikuantitatifkan.
2. Penentuan besaran target didasarkan:
  - Peraturan perundang-undangan, peraturan lainnya atau kebijakan menteri yang berlaku.
  - Keinginan *stakeholder*.
  - Realisasi tahun lalu.
  - Potensi dan proyeksi atas kondisi internal dan eksternal organisasi.
3. Target harus menantang namun dapat dicapai serta diupayakan terus meningkat.

*Cascading* dilakukan untuk setiap sasaran strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), target, dan/atau inisiatif strategis di perspektif yang sama menggunakan salah satu metode *cascading* yang relevan, yaitu:

1. Adopsi langsung, yang merupakan metode *cascading* dengan pendelegasian obyek *cascading* atasan apa adanya tanpa ada perubahan. Metode ini biasanya digunakan jika pendelegasian dilakukan apa adanya kepada 1 (satu) unit kerja bawahan.
2. Lingkup dipersempit, yang merupakan metode *cascading* yang mendelegasikan obyek *cascading* berdasarkan lingkup obyek *cascading* tersebut. Metode ini biasanya digunakan jika pendelegasian dilakukan untuk lebih dari 1 (satu) unit kerja.
3. Komponen pembentuk, yang merupakan metode *cascading* yang mendelegasikan komponen pembentuk dari obyek *cascading* tersebut. Metode ini biasanya digunakan jika pendelegasian dilakukan untuk lebih dari 1 (satu) unit kerja.



- 
4. Buat baru, yang merupakan metode *cascading* yang digunakan untuk membuat baru obyek *cascading* di unit kerja bawahan dan berkontribusi dalam mencapai kinerja atasan.

Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda adalah unit kerja yang sifatnya mendukung kinerja dibidang kepemudaan sehingga *cascading* tidak secara langsung, yang mana bisa masuk dalam metode komponen pembentuk ataupun pembuatan baru dalam metode *cascading*. Proses penghitungan indeks capaian SK juga memperhitungkan jenis polarisasi SK yang berlaku, yakni *maximize*, *minimize* dan *stabilize*. Polarisasi data menunjukkan ekspektasi (harapan) arah nilai aktual/realisasi dari IKU dibandingkan relatif terhadap nilai target.

1. **Maximize**: Semakin tinggi nilai aktual/realisasi IKU terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya.
2. **Minimize**: Semakin rendah nilai aktual/realisasi IKU terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya.
3. **Stabilize**: Capaian kinerja dianggap semakin baik apabila nilai aktual/realisasi IKU mendekati target dalam suatu rentang tertentu.

Pada LKj Tahun 2021, realisasi IKU yang berhasil dicapai dilakukan perbandingan dengan target yang telah direncanakan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Selanjutnya, realisasi IKU juga dilakukan terhadap capaian IKU pada tahun-tahun sebelumnya. Polarisasi data yang digunakan lebih mengarah kepada tipe *Maximize*.



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja (*performance result*) Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda Tahun 2021 dapat dilihat dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam penetapan rencana kinerja (*performance plan*) dengan realisasi capaian kinerja. Berdasarkan pengukuran kinerja organisasi di lingkungan Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda Tahun 2021, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 5. Capaian Kinerja Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI CAPAIAN TARGET	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI PAGU ANGGARAN	%
Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur kepemudaan serta tersusunnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Kepemudaan	Jumlah kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Kepemudaan yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Rp946.165.000	Rp944.891.000	99,87%
	Jumlah Lembaga Penerima Bantuan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan	93 Lembaga	93 Lembaga	100%	Rp10.796.310.000	Rp10.793.464.000	99,97%
	Koordinasi para pemangku kepentingan bidang standardisasi serta sarana dan prasarana kepemudaan	34 Provinsi	34 Provinsi	100%	Rp357.525.000	Rp356.207.000	99,63%

---

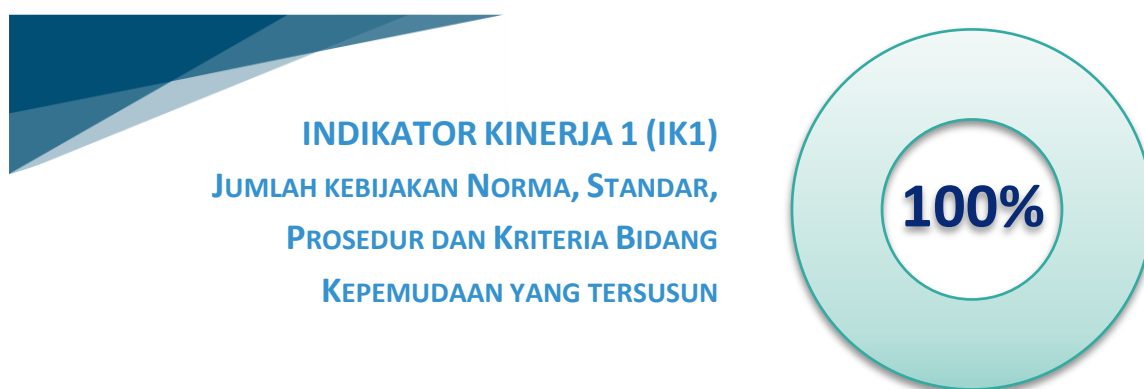
Capaian kinerja yang didapat memperlihatkan kualitas dan kuantitas kinerja Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda cukup tinggi. Capaian kinerja Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda secara keseluruhan adalah **100%**. Anggaran yang dialokasikan kepada Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda secara total pada awalnya sebanyak **Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Miliar Rupiah)** dan dilakukan *refocusing* anggaran untuk penanganan *covid-19* menjadi sebesar **Rp. 12.100.000.000,- (Dua Belas Miliar Seratus Juta Rupiah)**. Dalam pencapaian kinerja tersebut anggaran yang digunakan atau terserap sebanyak **Rp. 12.094.562.000,- (Dua Belas Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)** atau **99,96%**.

Indikator kinerja yang ada pada Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda ini mendukung capaian kinerja dari Deputi Pengembangan Pemuda dalam hal meningkatnya partisipasi pemuda dalam bidang sosial, politik dan lingkungan hidup, meningkatnya pemuda berwirausaha dan meningkatnya peran aktif pemuda pada tingkat global. Indikator ini memang tidak turunan langsung dengan capaian tersebut, yang dimana sifat dari unit kerja kami adalah pendukung dari program-program kepemudaan dalam menunjang fasilitas infrastruktur kepemudaan dan juga standardisasi di bidang kepemudaan. Dengan adanya pendukung ini kegiatan/ program kepemudaan bisa berjalan lebih baik dan juga bisa mengembangkan potensi kepemudaan di berbagai daerah. Dengan adanya standardisasi di bidang kepemudaan dan fasilitas infrastruktur diharapkan minat pemuda dalam menjalankan aktifitas menjadi lebih besar. Karena dengan banyak pilihan aktifitas bagi pemuda dengan berbagai daya tarik masing-masing baik positif dan negatif, oleh karena itu diperlukan daya tarik positif agar banyak pemuda di Indonesia ini mengarah dengan aktifitas-aktifitas yang positif sehingga berguna bagi Bangsa dan Negara kedepannya.

Sebagai penjelasan terhadap capaian kinerja tersebut di bawah ini dilakukan analisis capaian kinerja untuk mengetahui proses, permasalahan, kelebihan serta kekurangan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja 2021 di Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda. Analisis capaian kinerja ini tentunya melihat target dan realisasi tahun ini, realisasi kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, analisis penyebab keberhasilan serta inovasi dan solusi yang dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/ kegiatan yang berdampak besar terhadap capaian kinerja.



### 3.1.1 Indikator Kinerja 1



Sasaran Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan naskah kebijakan standardisasi dan infrastruktur Pemuda. Pada tahun 2021 Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda melakukan pembuatan standardisasi kepemudaan tentang paskibraka dan sarana prasarana kepemudaan. Pembuatan standardisasi ini dituangkan dalam bentuk draft naskah kebijakan yang nantinya akan diajukan sebagai usulan Perubahan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Paskibraka dan Pembuatan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang standardisasi sarana dan prasarana kepemudaan. Kegiatan yang mendukung kepada sasaran kegiatan tersebut adalah Pembuatan Standardisasi kepemudaan, yang terdiri dari :

1. Review Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Paskibraka.
2. Penyusunan pedoman Standardisasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan.

Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk Forum Grup Diskusi yang dilakukan oleh tim penyusun yang sudah dibentuk dengan rapat-rapat internal, rapat *fullday* dan *fullboard* di Jakarta yang mengundang pihak eksternal terkait dalam hal menerima masukan dan saran-saran perbaikan untuk pembuatan standardisasi tersebut. Kegiatan ini dilakukan dengan luring maupun daring sehingga berbagai pihak tetap bisa ikut berpartisipasi di tengah pandemi *covid-19* ini.

Kebijakan standardisasi ini diharapkan nantinya dapat menjadi dasar perubahan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga di bidang Paskibraka dan juga Pembentuk Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga dalam bidang standardisasi sarana dan prasarana kepemudaan. Hal ini diharapkan nantinya menjadi tolak ukur dan acuan bagi Pemerintah Pusat pada kementerian lain yang terkait dalam bidang kepemudaan, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program-programnya serta masyarakat maupun

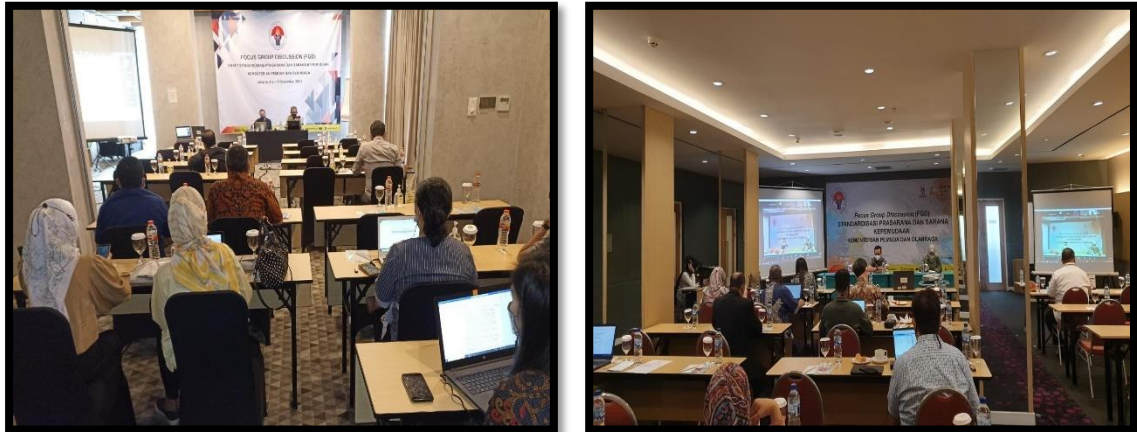
sektor swasta yang ingin berkontribusi untuk memajukan kepemudaan di Indonesia. Nantinya memang sangat diperlukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan dan juga para penerima manfaat dari kebijakan ini sehingga kebijakan ini dapat berjalan dengan baik dan juga menerima masukan-masukan untuk perbaikan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

**Nilai manfaat** Standardisasi dalam bidang paskibraka ini sangat berdampak dengan pelaksanaan paskibraka baik di daerah maupun di pusat. Diharapkan tidak adanya lagi perbedaan proses pelaksanaan sehingga hasil yang didapatkan memang betul pantas dan bagus. Dengan proses pelaksanaan yang baik pula juga menumbuhkan semangat berkompetisi positif sehingga para pemuda kita memiliki semangat juang dan jiwa kompetitif yang berlandaskan Ideologi Pancasila untuk memajukan Bangsa dan Negara.

Standardisasi dalam bidang sarana dan prasarana kepemudaan juga diharapkan dapat menjadi pendorong nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di setiap daerah menjadi lebih baik lagi. Dengan terstandarkannya fasilitas sarana dan prasarananya diharapkan program pelayanan kepemudaan pun dapat berjalan optimal. Hal ini mendorong para pemangku kepentingan untuk dapat berpartisipasi lebih dan tidak mengalami kerancuan standar dalam pembangunan fasilitas sarana dan prasarana kepemudaan. Diharapkan pula dapat sesuai dengan potensi yang ada di daerah masing-masing sehingga program dan fasilitas yang ada menjadi selaras dan pelaksanaannya menjadi lebih bermanfaat kedepannya. Selain itu juga ini memudahkan bagi kami di Pemerintah Pusat dalam menjalankan tugas fungsi kami untuk memenuhi fasilitas kepemudaan baik dengan dana yang melalui Kemenpora ataupun dengan kementerian terkait lainnya dan bisa juga bekerja sama dengan pihak masyarakat ataupun swasta.



Gambar 3. Standardisasi tentang Sarana dan Prasarana Kepemudaan



**Gambar 4. Standardisasi tentang Sarana dan Prasarana Kepemudaan**

Kegiatan Standardisasi Bidang Kepemudaan telah dilaksanakan pada tahun 2021 dengan capaian IK1 ini sebesar **100%**, yaitu telah terealisasi 2 Dokumen dari yang di targetkan 2 Dokumen, sebagaimana berikut:

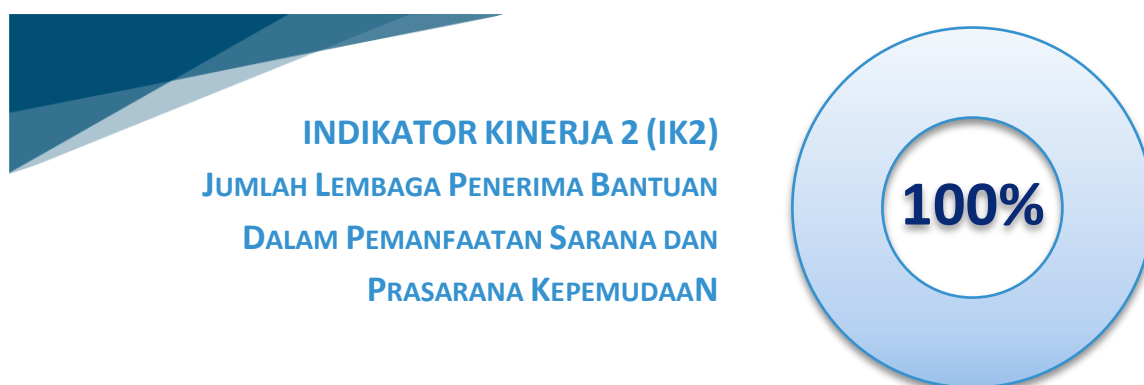


**Tabel 6. Perbandingan Capaian IK1 Tahun 2019, 2020, dan 2021**

Indikator Kinerja 1	Informasi Kinerja	2019	2020	2021
Jumlah kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kepemudaan yang tersusun	Target	1 Naskah	2 Naskah	2 Dokumen
	Realisasi	1 Naskah	2 Naskah	2 Dokumen
	Capaian	100%	100%	100%

Realisasi Anggaran untuk IK1 pada tahun 2021 adalah **Rp. 944.891.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 946.165.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)** atau terserap **99.87%**.

### 3.1.2 Indikator Kinerja 2



Demi mendukungnya pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan di Indonesia maka diperlukan juga fasilitas penunjang yaitu sarana dan prasarana kepemudaan. Program Bantuan Pemerintah untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi prasarana kepemudaan serta bantuan sarana kepemudaan untuk menunjang aktifitas kepemudaan merupakan program Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam rangka mendorong dan tercapainya tujuan strategis *“Terwujudnya pemuda berkualitas yang berideologi Pancasila”*. Dengan adanya fasilitas penunjang dalam bentuk sarana dan prasarana kepemudaan, kegiatan maupun program-program kepemudaan dapat berjalan dengan lancar dalam membentuk karakter pemuda, menemukan potensi pemuda di berbagai daerah dan juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi Pemuda Indonesia untuk berkembang. Pada dasarnya Indonesia mendapatkan bonus demografi sehingga diperlukan program yang tepat dan juga fasilitas penunjang agar bonus demografi tersebut tidak menjadi efek buruk yang justru menjadi beban Negara apabila tidak disikapi dengan baik. Indikator kinerja ini dicapai melalui 2 program, yaitu : bantuan prasarana kepemudaan dan bantuan sarana kepemudaan.

Prasarana Kepemudaan adalah gedung/bangunan atau tempat/ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Bantuan prasarana kepemudaan pada tahun 2021 ini berupa Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung dan Bangunan dilaksanakan dalam bentuk transfer uang ke rekening Penerima Bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Petunjuk Teknis Bantuan Prasarana Kepemudaan tertuang pada Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Nomor 12.28.6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Dukungan Prasarana Kepemudaan Tahun Anggaran 2021.

Bantuan ini diperuntukan untuk Lembaga/ Organisasi/ Yayasan Penyelenggara Bidang Kepemudaan. Kegiatan Bantuan Pemerintah adalah fasilitasi prasarana kepemudaan melalui pembangunan/ rehabilitasi prasarana yang diperlukan bagi kegiatan dan pelayanan kepemudaan. Tahun 2021 Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda menargetkan 22 lembaga dan telah diselesaikan dengan jumlah 22 lembaga. Nilai bantuan yang diberikan untuk bantuan prasarana kepemudaan untuk setiap paketnya kepada masing-masing lembaga sebesar @Rp 250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).





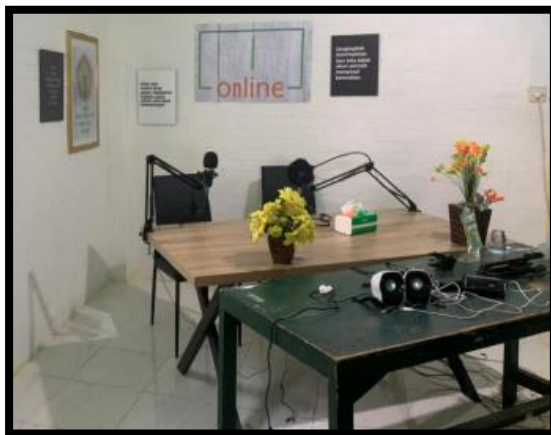


**Gambar 5. Bantuan Prasarana Kepemudaan**

Sarana Kepemudaan adalah barang dan/atau alat untuk mendukung aktivitas kepemudaan dan kepramukaan. Bantuan sarana kepemudaan pada tahun 2021 ini dilaksanakan dalam bentuk transfer uang ke rekening Penerima Bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Kepemudaan tertuang pada Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Nomor 12.28.7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Dukungan Sarana Kepemudaan Tahun Anggaran 2021. Bantuan ini diperuntukan untuk Lembaga/ Organisasi/ Yayasan Penyelenggara Bidang Kepemudaan. Pemberian Bantuan Dukungan Sarana Kepemudaan dalam bentuk uang bertujuan untuk memberikan fasilitas sarana aktivitas kepemudaan sebagai fasilitas dalam pengembangan potensi pemuda. Pemberian Bantuan Dukungan Sarana Kepemudaan dalam bentuk uang bertujuan untuk memberikan fasilitas sarana aktivitas kepemudaan sebagai fasilitas dalam pengembangan potensi pemuda. Bantuan Sarana ini diberikan di semua wilayah Indonesia dengan total target 71 Lembaga dan sudah tersalurkan sebanyak 71 Lembaga. Nilai bantuan yang diberikan untuk bantuan sarana kepemudaan untuk setiap paketnya kepada masing-masing lembaga sebesar **@Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).**







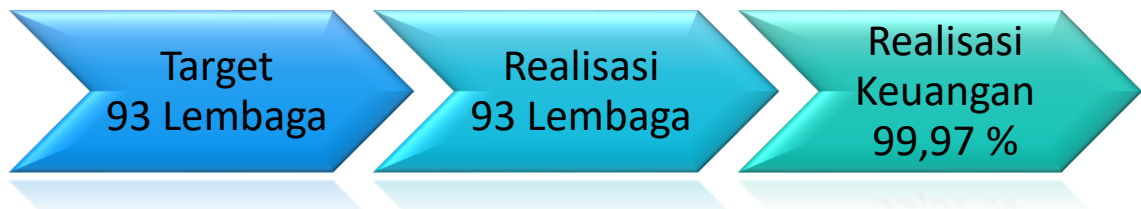
**Gambar 6. Bantuan Sarana Kepemudaan**

Dalam pelaksanaannya Bantuan Sarana dan Prasarana Kepemudaan ini terdapat beberapa kendala terlebih disituasi pandemi *COVID-19* yang masih belum usai. Dalam pelaksanaannya kami mencoba untuk melakukan tugas fungsi perencanaan serta pengawasan melalui daring dan luring sehingga kegiatan bisa tetap berjalan. Kami juga melakukan bimbingan kepada lembaga penerima bantuan yang sudah disalurkan agar pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang tertuang didalam perjanjian kerjasama dan juga pemanfaatan dapat berjalan lebih optimal. Keterbatasannya

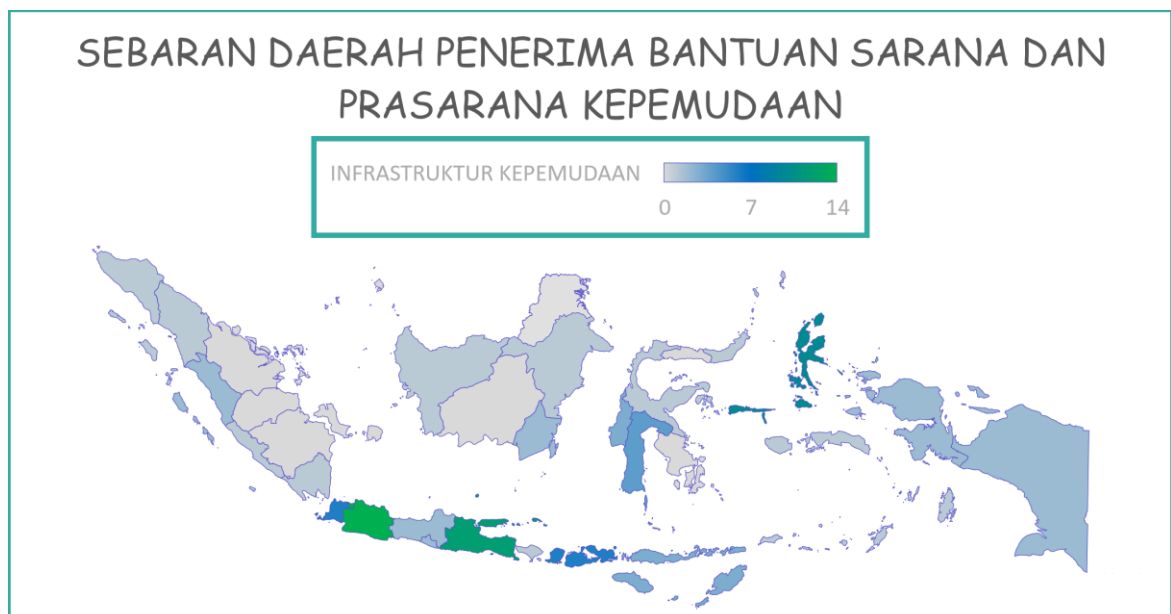
pengetahuan para lembaga dalam mengelola uang/ anggaran dari pemerintah juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami, sehingga kami harus betul-betul mengawal dan melakukan bimbingan kepada penerima bantuan.

**Nilai manfaat** Bantuan Sarana dan Prasarana Kepemudaan diharapkan menambahkan minat dan semangat juang para pemuda dalam melakukan aktifitas yang positif sehingga tercapainya tujuan strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga, tentunya didukung program-program kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) kepemudaan. Dengan adanya bantuan ini diharapkan program dapat berjalan lebih baik sehingga dampak yang dirasakan lebih terasa dan pihak swasta maupun masyarakat lebih baik lagi untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur kepemudaan.

Kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana Kepemudaan telah dilaksanakan pada tahun 2021 dengan capaian IK2 ini sebesar **100%**, yaitu telah terealisasi 93 Lembaga dari yang di targetkan 93 Lembaga, sebagaimana berikut:



Dari 93 Lembaga tersebut berikut gambaran sebaran Lembaga yang menerima bantuan sarana dan prasarana kepemudaan di Indonesia:



Gambar 7. Peta Sebaran Penerima Bantuan

Tabel 7. Sebaran Daerah Penerima Bantuan

NO	PROVINSI	PRASARANA	SARANA	INFRASTRUKTUR KEPEMUDAAN
1	Aceh	-	1	1
2	Sumatera Utara	-	1	1
3	Sumatera Barat	1	1	2
4	Riau	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-
6	Jambi	-	-	-
7	Sumatera Selatan	-	-	-
8	Bangka Belitung	-	-	-
9	Bengkulu	-	1	1
10	Lampung	-	1	1
11	DKI Jakarta	2	11	13
12	Banten	2	4	6
13	Jawa Barat	5	9	14
14	Jawa Tengah	2	-	2
15	Yogyakarta	-	2	2
16	Jawa Timur	3	9	12
17	Kalimantan Barat	-	1	1
18	Kalimantan Tengah	-	-	-
19	Kalimantan Selatan	-	2	2
20	Kalimantan Timur	-	1	1
21	Kalimantan Utara	-	-	-
22	Bali	-	1	1
23	Nusa Tenggara Barat	2	4	6
24	Nusa Tenggara Timur	-	3	3
25	Sulawesi Utara	-	1	1
26	Gorontalo	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	1	1
28	Sulawesi Barat	1	2	3
29	Sulawesi Selatan	1	3	4
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-
31	Maluku	-	1	1
32	Maluku Utara	3	7	10
33	Papua Barat	-	2	2
34	Papua	-	2	2
TOTAL		22	71	93

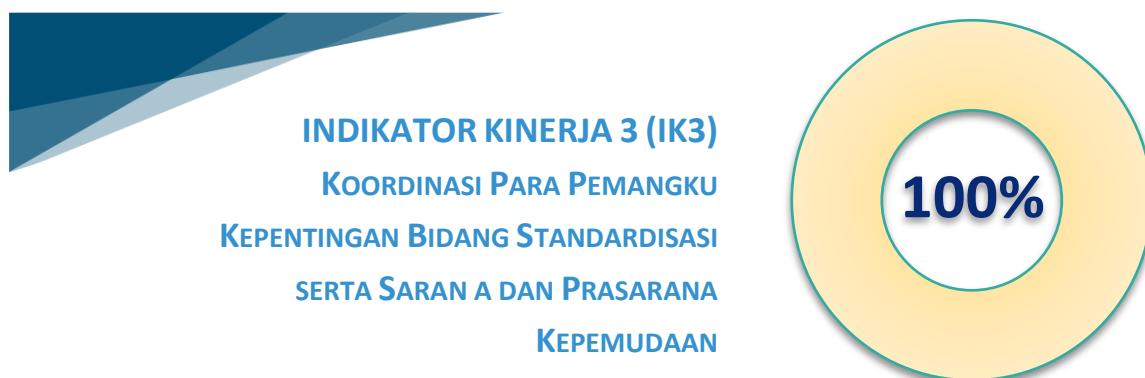
Capaian indikator kinerja 2 (IK2) tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 dengan nilai pagu yang hampir sama, dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 8. Perbandingan Capaian IK2 Tahun 2019, 2020, dan 2021

Indikator Kinerja 2	Informasi Kinerja	2019	2020	2021
Jumlah lembaga penerima bantuan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan	Target	96 Lembaga	92 Lembaga	93 Lembaga
	Realisasi	122 Lembaga	92 Lembaga	93 Lembaga
	Capaian	127%	100%	100%

Realisasi Anggaran untuk IK2 ini adalah **Rp. 10.793.464.000,- (Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 10.796.310.000,- (Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)** atau terserap **99.97%**.

### 3.1.3 Indikator Kinerja 3



Pada indikator kinerja ini dalam pelaksanaannya adalah pembuatan direktori sarana dan prasarana kepemudaan. Mengingat bahwa program pembangunan pemuda merupakan hal krusial yang akan menentukan kualitas dan situasi pembangunan bangsa kedepan, maka pemerintah harus turun tangan. Selain beragam bentuk kebijakan yang mengarah pada berbagai bentuk program dan kegiatan, hal yang tidak kalah penting tentunya dukungan sarana dan prasarana. Dalam setiap bentuk program dan kegiatan, hampir terlalu sulit kiranya untuk menghindarkan kebutuhan sarana dan prasarana untuk tidak diabaikan. Berangkat dari gambaran realitas kepemudaan yang relatif presisi, maka dimungkinkan akan memunculkan rekomendasi kebutuhan program-program pengembangan yang tepat pula. Melalui berbagai analisis rekomendasi program-program inilah kemudian diharapkan akan secara definitif menuntun penyusunan program kebutuhan kebijakan terkait sarana dan prasarana kepemudaan yang lebih tepat. Tujuan direktori ini adalah memperoleh gambaran secara umum karakteristik dan kondisi kepemudaan Indonesia per-provinsi sebagai dasar penyusunan kebijakan sarana dan prasarana kepemudaan serta merumuskan rekomendasi kebijakan-kebijakan program Sarana dan Prasarana kepemudaan berdasarkan analisis situasi melalui data yang terhimpun.

Dalam penyusunan direktori ini diperlukannya koordinasi dengan pemerintah provinsi khususnya mendapatkan data primer, yaitu Data yang dihimpun dari sumber langsung berupa penuturan maupun isian instrument dari pemerintah daerah terkait kebijakan, keberadaan, serta pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan. Data sekunder juga dipergunakan selain data primer yang didapatkan, data sekunder yang digunakan dalam direktori ini berupa dua hal. Pertama, berupa data-data

---

yang tersebar dalam berbagai platform media massa berupa berita, kajian, ulasan, maupun berbagai informasi yang diunggah secara resmi oleh lembaga-lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah. Kedua, data yang digunakan adalah berbagai dokumen yang sudah dikeluarkan dan digunakan oleh untuk pembangunan dan pengembangan kepemudaan dalam lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga.

**Nilai manfaat** dari direktori ini dapat mendapatkan data-data yang nantinya diharapkan dapat menggambarkan:

1. Karakteristik daerah yang meliputi sumber daya alam dan sosialnya.
2. Kondisi demografis kependudukan yang meliputi tingkat pendidikan, penghasilan, jenis pekerjaan, maupun yang lainnya.
3. Jumlah komposisi pemuda dalam lingkup provinsi.
4. Tingkat pendidikan para pemuda.
5. Jenis pekerjaan maupun profesi yang dijalani para pemuda.

Dari data-data ini diharapkan mendapatkan pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana yang tepat guna dan tepat sasaran baik dilakukan Pemerintah Pusat , Pemerintah Daerah maupun peran masyarakat/ swasta.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyusunan direktori ini adalah seputar masalah pencarian data dengan berkoordinasi dengan berbagai pemerintah daerah dengan situasi pandemi *covid-19* yang masih berlangsung. Walaupun dengan adanya kemajuan teknologi yang ada tetapi rasanya masih kurang bila kita belum mendata secara langsung ataupun melihat dan berkoordinasi secara langsung sehingga gambaran yang didapatkan menjadi lebih jelas. Selain itu juga program ini beberapa kali mengalami *refocusing* anggaran sehingga ada beberapa anggaran yang harus diberikan untuk penanganan *covid-19* namun kita tetap harus mencapai target yang sudah ditetapkan. Dengan adanya kendala tersebut kami tetap menjalankan ini dengan sebaik mungkin yang kita bisa dapatkan dengan berbagai inovasi yang kita jalankan. Inovasi yang kita jalankan baik melalui daring maupun luring selain itu juga kami membuat tim-tim kecil agar pengumpulan data dapat berjalan dengan maksimal dan juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal permintaan data dan partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah dalam mengikuti kegiatan ini.





**Gambar 8. Direktori Sarana & Prasarana Kepemudaan**

Indikator kinerja ini baru di tahun 2021 sehingga belum ada perbandingan data di tahun-tahun sebelumnya, walaupun begitu indikator ini tetap menunjang dengan capaian kinerja Deputi Pengembangan Pemuda. Kegiatan Koordinasi para pemangku kepentingan

bidang standardisasi serta sarana dan prasarana kepemudaan telah dilaksanakan pada tahun 2021 dengan capaian IK3 ini sebesar **100%**, yaitu telah terealisasi 34 Provinsi dari yang di targetkan 34 Provinsi, sebagaimana berikut:



Tabel 9. Perbandingan Capaian IK1 Tahun 2019, 2020, dan 2021

Indikator Kinerja 3	Informasi Kinerja	2019	2020	2021
Koordinasi para pemangku kepentingan bidang standardisasi serta sarana dan prasarana kepemudaan	Target	-	-	34 Provinsi
	Realisasi	-	-	34 Provinsi
	Capaian	-	-	100%

Realisasi Anggaran untuk IK3 ini adalah **Rp. 356.207.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Rupiah)** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 357.525.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)** atau terserap **99.63%**.

### 3.1.4 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Pada penjelasan subbagian indikator kinerja masing-masing sudah diterangkan berapa biaya yang sudah dilakukan efisiensi dalam mencapai capaian kinerja tersebut berdasarkan anggaran yang sudah dilakukan *refocussing*. Pada awalnya Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2021 pada Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda sebesar **Rp 15.000.000.000,- (Lima Belas Miliar Rupiah)**. Kemudian di tahun 2021 ini dengan situasi pandemi *covid-19* yang belum usai maka dilakukan *refocusing* sebesar **Rp 2.900.000.000,- ( Dua Miliar Sembilan Ratus Juta**

**Rupiah)** sehingga anggaran yang tersedia menjadi **Rp 12.100.000.000,- (Dua Miliar Seratus Juta Rupiah)**. Dari anggaran tersebut kami berhasil melakukan inovasi dan kerja-kerja cerdas untuk mendapatkan capaian kinerja yang sama tanpa harus mengurangi target. Sehingga dengan pengurangan anggaran dan realisasi anggaran kami yang mencapai **Rp 12.094.562.000,- (Dua Belas Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)** kami mendapatkan capaian kinerja dengan target yang sama seperti yang direncanakan. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100 \%$$

Keterangan :

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran keluaran i

CKi : Capaian Kinerja i

**Tabel 10. Data Perhitungan Efisiensi**

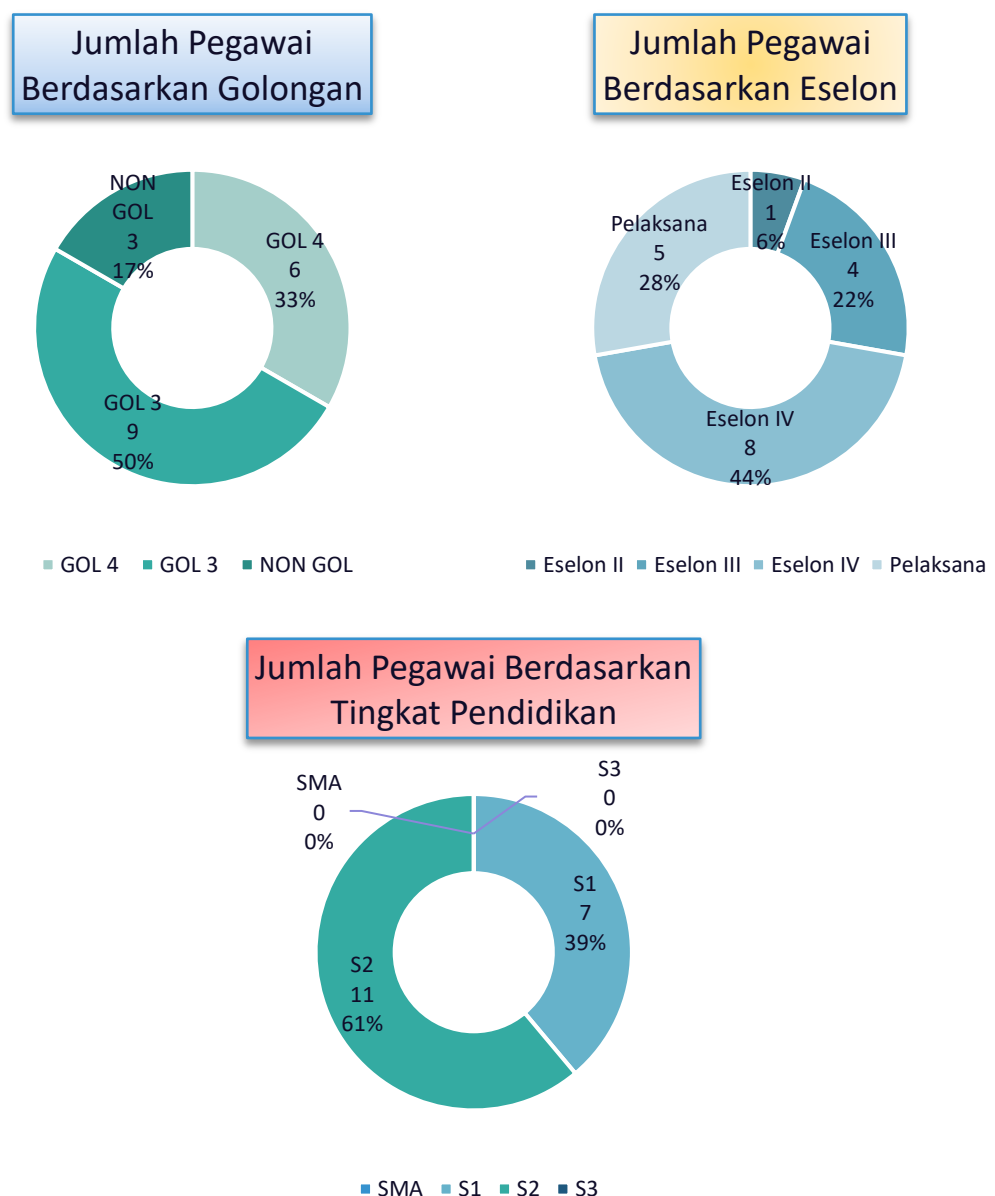
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian Keluaran (CK)</b>	<b>Pagu Anggaran (PAK)</b>	<b>Realisasi Anggaran (RAK)</b>
IK1	1.00	1.806.834.000	944.891.000
IK2	1.00	12.362.461.000	10.793.464.000
IK3	1.00	830.705.000	356.207.000

Catatan : Berdasarkan pagu awal dan realisasi akhir

Dengan perhitungan di atas, diperoleh total persentase **efisiensi biaya sebesar 19,37 %**. Persentase ini cukup besar sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2021 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Efisiensi sumber daya baik biaya maupun manusia tersebut, telah menghasilkan prestasi keberhasilan capaian yang cukup signifikan pada sasaran strategis, mencapai target-target IK yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, dengan tetap menjaga kualitas kinerja.

Efektif dan efisiennya kinerja di lingkungan Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda juga dipengaruhi oleh jumlah sumber daya manusia yang ada. Dengan jumlah sumber daya manusia yang cukup dan didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan mampu mendukung tercapainya target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk dapat menjalankan efisiensi dan efektivitas kinerja sumber daya manusia di lingkungan Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda

ini adalah dengan mengoptimalkan tenaga yang ada dan memanfaatkan penggunaan program-program teknologi yang dapat membantu proses percepatan dan koordinasi pekerjaan. Disamping itu pula beberapa tenaga dari luar dioptimalkan penggunaannya sehingga dapat membantu beban kerja yang sifatnya teknis maupun administratif tentunya dengan pertimbangan yang baik sehingga tidak menjadi beban negara namun tetap efektif dan efisien dalam pemanfaatannya. Dengan langkah tersebut efisiensi, efektivitas dan stabilitas kinerja kegiatan dapat terjaga sehingga dapat mendukung pencapaian program.



Gambar 9. Diagram Pegawai

### 3.2 Realisasi Anggaran

Pendanaan Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda Tahun Anggaran 2021 adalah Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2021 pada Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda No DIPA, SP.DIPA-092.01.1.418138/2021 ; tanggal 23 November 2020 sebesar **Rp 15.000.000.000,- (Lima Belas Miliar Rupiah)** dan dengan adanya *refocusing* untuk penanganan *covid-19* pagu akhir Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda menjadi sebesar **Rp 12.100.000.000,- (Dua Belas Miliar Seratus Juta Rupiah)** dengan capaian realisasi sebesar **Rp 12.094.562.000,- (Dua Belas Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)** atau **99,96%** dari pagu akhir. Berikut perbandingan realisasi anggaran dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 11. Perbandingan realisasi anggaran TA 2020 dan TA 2021 (dalam ribu)

Kegiatan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Pengembangan Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
	42.878.600	39.744.840	15.000.000	14.701.052,9	12.100.000	12.094.562
% Penyerapan	92.69 %		98.01 %		99.96 %	

Dengan membandingkan realisasi anggaran tahun 2020 dengan realisasi anggaran tahun 2021 terdapat peningkatan prestasi penyerapan sebesar **1,95%** . Namun, secara besaran pagu yang diberikan mengalami penurunan, hal ini terkait faktor pandemi *covid-19*. Walaupun dengan besaran nilai yang lebih kecil tetapi capaian kinerja yang diberikan masih didapatkan lebih besar dibandingkan tahun kemarin dan juga nilai efisiensi yang cukup besar dengan target dan capaian yang sama. Faktor pandemi tahun ini cukup besar dengan kebijakan pemerintah dalam menerapkan PPKM sehingga perlu beberapa penyesuaian dalam pelaksanaan program selain itu juga menyebabkan beberapa kali revisi anggaran akibat

---

*refocusing* sehingga penyerapan tertunda. Namun demikian telah dilakukan berbagai antisipasi dan percepatan sehingga per 31 Desember 2021 tercapai penyerapan sebesar **99,96%**.

---

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda tahun 2021. Penetapan kinerja yang berisi target-target kinerja, pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai. Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus dapat dipertanggungjawabkan dan dituangkan dalam Laporan Kinerja. Dari uraian pencapaian kinerja dalam BAB III, Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, sebagaimana kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda.

#### 4.1 Kesimpulan

Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana mandat untuk melaksanakan sebagian dari RPJMN yang diturunkan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis Kemenpora 2020-2024. Sasaran program/ kegiatan pada Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda adalah **“Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur kepemudaan serta tersusunnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Kepemudaan”**, sehingga indikator ketercapaian target dari sasaran program sebagai berikut:

1. Jumlah kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Kepemudaan yang tersusun telah tercapai sebesar 100% dari target 2 Dokumen berupa Standardisasi Paskibraka dan Standardisasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan.
2. Jumlah Lembaga Penerima Bantuan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan telah tercapai sebesar 100% dari target 93 Lembaga berupa Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
3. Koordinasi para pemangku kepentingan bidang standardisasi serta sarana dan prasarana kepemudaan telah tercapai sebesar 100% dari target 34 Provinsi berupa Penyusunan direktori sarana dan prasarana kepemudaan yang dikumpulkan dari 34 provinsi.



- 
4. Realisasi Anggaran mencapai **99,96%** atau sebanyak **Rp 12.094.562.000,- (Dua Belas Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)** dari Pagu Anggaran akhir sebesar **Rp 12.100.000.000,- (Dua Belas Miliar Seratus Juta Rupiah)** dengan melakukan efisiensi yang cukup signifikan sebesar **19,37 %** dari pagu awal **Rp 15.000.000.000,- (Lima Belas Miliar Rupiah)** dengan target dan capaian yang tetap dan tidak berkurang.

#### 4.2 Kendala dan Permasalahan

Di dalam pelaksanaannya diperlukan Inovasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan di Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda akibat adanya *refocussing* anggaran dan pandemi *covid 19* yang belum selesai. Sepanjang tahun 2021 dalam pelaksanaan kegiatan menghadapi beberapa kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Secara umum, hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan telah tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan walau masih terdapat kendala dan permasalahan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan yang belum maksimal dengan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
2. Belum optimalnya implementasi terhadap standardisasi yang telah dibuat.
3. Belum adanya database sarana dan prasarana kepemudaan yang ada di Indonesia.
4. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang belum maksimal untuk dapat dipergunakan aktifitas pemuda secara umum.
5. Tidak adanya server penyimpanan besar dalam hal melakukan digitalisasi dokumen sehingga memudahkan dalam penyimpanan dan pencarian data.
6. Belum adanya penerapan tanda tangan digital sehingga menyulitkan pada situasi yang mengharuskan pekerjaan dilakukan secara *Work From Home (WFH)*.
7. Masih lemahnya sumber daya manusia yang ada seperti kemampuan yang masih kurang menunjang dan merata serta pemahaman terhadap khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya baru yang dikarenakan motivasi kerja yang kurang hingga kurangnya sumber daya yang tersedia.
8. Koordinasi antar unit kerja maupun instansi/ lembaga lain yang masih belum maksimal dan lemahnya dalam pemahaman bawah Kemenpora menjadi *leading sector* dibidang kepemudaan sehingga pengembangan pelayanan kepemudaan masih belum maksimal.

- 
9. Ruang kerja yang cukup sempit dan tidak memiliki ruangan yang memadai untuk para pegawainya dan juga tempat penyimpanan berkas ataupun hasil pekerjaan.

### 4.3 Pemecahan Masalah dan Upaya Perbaikan

Dalam melalui kendala-kendala yang ada antara lain diperlukan kerjasama pada bagian kesekretariatan dalam membangun penerapan tanda tangan digital, digitalisasi dokumen dan data satu server sehingga adanya integrasi antar unit kerja dalam membangun kepemudaan. Diperlukan pendidikan dan pelatihan yang lebih banyak lagi dalam pengembangan kompetensi pegawai serta menumbuhkan jiwa kompetisi yang positif dengan memberikan *reward and punishment*, pemberian motivasi kerja juga sangat diperlukan yang dimana kondisi setiap orang berbeda-beda demi menjaga konsistensi dalam pekerjaan, terus melakukan *update* pengetahuan tentang aturan-aturan terbaru dan perkembangan kebijakan dan melakukan sesi knowledge sharing dengan sesama pegawai juga merupakan hal yang sangat bermanfaat. Selanjutnya dalam hal teknis juga diperlukan studi banding dalam pembuatan standardisasi agar lebih terukur dan objektif, dalam penetapan pemberian bantuan sarana dan prasarana kepemudaan juga harus melihat data, minimal apa yang ada pada Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), selain itu juga diperlukan koordinasi dengan unit kerja lain yang mengurus kepemudaan sehingga program berjalan selaras dan untuk tahun anggaran yang akan datang perlu dilakukan penyelarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pemuda Olahraga Tahun 2020-2024, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Deputy, dan Perjanjian Kinerja (PK) Asisten Deputy Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda dengan konsisten, baik dan tepat. Hal lain yang perlu menjadi catatan penting adalah perlunya peningkatan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga dan penyelarasan *Output* kegiatan dengan *Outcome* yang mengacu pada Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Melalui Laporan Kinerja (LKJ) Asisten Deputy Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda Tahun 2021, diharapkan menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam merencanakan program dan kegiatan yang lebih baik lagi sehingga tercapainya tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2020-2024.

## LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA 2021**  
**ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**  
**PADA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Angrelia Dwi Pramestisari, SE  
 Jabatan : Kepala Bidang Standardisasi Organisasi dan Sarana Kepemudaan

selanjutnya disebut pihak pertama



Nama : Andi Susanto, S.STP., M.Sc  
 Jabatan : Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,  
   
 Andi Susanto, S.STP., M.Sc Angrelia Dwi Pramestisari, SE

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2021**

**PERJANJIAN KINERJA 2021**  
**ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**  
**PADA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**KEPALA BIDANG STANDARDISASI ORGANISASI DAN SARANA KEPEMUDAAN**  
**PADA ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Kepemudaan	Jumlah Standardisasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan serta Standardisasi Paskibraka yang tersusun	2 dokumen
		Koordinasi Para Pemangku Kepentingan Bidang Standardisasi dan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	34 provinsi

Jakarta, Maret 2021

Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda Kepala Bidang Standardisasi Organisasi dan Sarana Kepemudaan

   
 Andi Susanto, S.STP., M.Sc Angrelia Dwi Pramestisari, SE

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2021**

**PERJANJIAN KINERJA 2021**  
**ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**  
**PADA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arief Nurbani Siswoyo, S.Pd., M.Si  
 Jabatan : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Timur

selanjutnya disebut pihak pertama


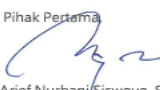
Nama : Andi Susanto, S.STP., M.Sc  
 Jabatan : Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,  
   
 Andi Susanto, S.STP., M.Sc Arief Nurbani Siswoyo, S.Pd., M.Si

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2021**



**PERJANJIAN KINERJA 2021**  
**ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**  
**PADA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA INDONESIA TIMUR**  
**PADA ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur Kepemudaan	Jumlah Lembaga Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Wilayah Indonesia Timur dalam Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	26 Lembaga

Jakarta, Maret 2021

Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia timur

   
 Andi Susanto, S.STP., M.Sc Arief Nurbani Siswoyo, S.Pd., M.Si

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2021**

**PERJANJIAN KINERJA 2021**  
**ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**  
**PADA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heru Bramoro, ST., MM  
 Jabatan : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Andi Susanto, S.STP., M.Sc  
 Jabatan : Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda

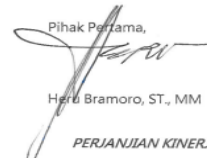
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua,  Andi Susanto, S.STP., M.Sc

Pihak Pertama,  Heru Bramoro, ST., MM

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2021**

**PERJANJIAN KINERJA 2021**  
**ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**  
**PADA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA INDONESIA TENGAH**  
**PADA ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur Kepemudaan	Jumlah Lembaga Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Wilayah Indonesia Tengah dalam Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	30 Lembaga

Jakarta, Maret 2021

Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda  Andi Susanto, S.STP., M.Sc

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Tengah  Heru Bramoro, ST., MM

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2021**

**PERJANJIAN KINERJA 2021**  
**ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**  
**PADA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasan Nawawi, S.H  
 Jabatan : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Barat

selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Andi Susanto, S.STP., M.Sc  
 Jabatan : Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua,  Andi Susanto, S.STP., M.Sc

Pihak Pertama,  Hasan Nawawi, S.H

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2021**

**PERJANJIAN KINERJA 2021**  
**ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**  
**PADA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA INDONESIA BARAT**  
**PADA ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur Kepemudaan	Jumlah Lembaga Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Wilayah Indonesia Barat dalam Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	37 Lembaga

Jakarta, Maret 2021

Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda  Andi Susanto, S.STP., M.Sc

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Barat  Hasan Nawawi, S.H

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2021**



**PERJANJIAN KINERJA 2021**  
**ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**  
**PADA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratih Usmawati, S.E., M.M.  
 Jabatan : Kepala Subbidang Organisasi Kepemudaan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Angrelia Dwi Pramestisari, SE  
 Jabatan : Kepala Bidang Standardisasi Organisasi dan Sarana  
 Kepemudaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,  
 Angrelia Dwi Pramestisari, SE Ratih Usmawati, S.E., M.M.

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2021**

**PERJANJIAN KINERJA 2021**  
**ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**  
**PADA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA SUBBIDANG ORGANISASI KEPEMUDAAN**  
**PADA ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Kepemudaan	Jumlah dokumen Standardisasi Paskibraka	1 dokumen
		Jumlah dokumen hasil Koordinasi Para Pemangku Kepentingan Bidang Organisasi Kepemudaan	1 dokumen

Jakarta, Maret 2021

Kepala Bidang Standardisasi Organisasi dan Sarana Kepemudaan Kepala Subbidang Organisasi Kepemudaan

Angrelia Dwi Pramestisari, SE Ratih Usmawati, S.E., M.M.

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2021**

**PERJANJIAN KINERJA 2021**  
**ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**  
**PADA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Ihsan B. Tjenreng, S.Kom  
 Jabatan : Kepala Subbidang Prasarana dan Sarana Organisasi  
 Kepemudaan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Angrelia Dwi Pramestisari, SE  
 Jabatan : Kepala Bidang Standardisasi Organisasi dan Sarana  
 Kepemudaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,  
 Angrelia Dwi Pramestisari, SE M. Ihsan B. Tjenreng, S.Kom

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2021**

**PERJANJIAN KINERJA 2021**  
**ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**  
**PADA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA SUBBIDANG PRASARANA DAN SARANA ORGANISASI KEPEMUDAAN**  
**PADA ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Kepemudaan	Jumlah dokumen Standardisasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan	1 dokumen
		Jumlah dokumen hasil Koordinasi Para Pemangku Kepentingan Bidang Standardisasi dan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	1 dokumen

Jakarta, Maret 2021

Kepala Bidang Standardisasi Organisasi dan Sarana Kepemudaan Kepala Subbidang Prasarana dan Sarana Organisasi Kepemudaan

Angrelia Dwi Pramestisari, SE M. Ihsan B. Tjenreng, S.Kom

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2021**



**PERJANJIAN KINERJA 2021**  
**ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**  
**PADA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irawan Junianto, SE., M.Ak

Jabatan : Kepala Subbidang Prasarana Indonesia Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arief Nurbani Siswoyo, S.Pd., M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua,

  
Arief Nurbani Siswoyo, S.Pd., M.Si

Pihak Pertama,

  
Irawan Junianto, SE., M.Ak

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2021**



**PERJANJIAN KINERJA 2021**  
**ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**  
**PADA DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**KEPALA SUBBIDANG PRASARANA INDONESIA TIMUR**

**PADA ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur Kepemudaan	Jumlah Lembaga Penerima Bantuan Prasarana wilayah Indonesia Timur dalam Pemanfaatan Prasarana Kepemudaan	5 Lembaga

Jakarta, Maret 2021

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Timur

  
Arief Nurbani Siswoyo, S.Pd., M.Si

Kepala Subbidang Prasarana Indonesia Timur

  
Irawan Junianto, SE., M.Ak

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2021**



**PERJANJIAN KINERJA 2021**  
**ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**  
**PADA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riza Arief Bijaksana, S.Psi

Jabatan : Kepala Subbidang Sarana Indonesia Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arief Nurbani Siswoyo, S.Pd., M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua,

  
Arief Nurbani Siswoyo, S.Pd., M.Si

Pihak Pertama,

  
Riza Arief Bijaksana, S.Psi

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2021**



**PERJANJIAN KINERJA 2021**  
**ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**  
**PADA DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**KEPALA SUBBIDANG SARANA INDONESIA TIMUR**

**PADA ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**

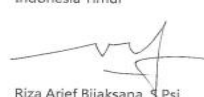
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur Kepemudaan	Jumlah Lembaga Penerima Bantuan Sarana wilayah Indonesia Timur dalam Pemanfaatan Sarana Kepemudaan	21 Lembaga

Jakarta, Maret 2021

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Timur

  
Arief Nurbani Siswoyo, S.Pd., M.Si

Kepala Subbidang Sarana Indonesia Timur

  
Riza Arief Bijaksana, S.Psi

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2021**

**PERJANJIAN KINERJA 2021**  
**ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**  
**PADA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rinaldy Meidianto, S.I.A., MM  
 Jabatan : Kepala Subbidang Prasarana Indonesia Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Heru Bramoro, ST., MM  
 Jabatan : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Tengah


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua,   
 Heru Bramoro, ST., MM

Pihak Pertama,   
 Rinaldy Meidianto, S.I.A., MM

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2021**

**PERJANJIAN KINERJA 2021**  
**ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**  
**PADA DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA SUBBIDANG PRASARANA INDONESIA TENGAH**  
**PADA ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur Kepemudaan	Jumlah Lembaga Penerima Bantuan Prasarana wilayah Indonesia Tengah dalam Pemanfaatan Prasarana Kepemudaan	7 Lembaga

Jakarta, Maret 2021

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Tengah   
 Heru Bramoro, ST., MM

Kepala Subbidang Prasarana Indonesia Tengah   
 Rinaldy Meidianto, S.I.A., MM

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2021**

**PERJANJIAN KINERJA 2021**  
**ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**  
**PADA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riana Octaria Fasha, S.Pd, M.Pd  
 Jabatan : Kepala Sub Bidang Sarana Kepemudaan Indonesia Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Heru Bramoro, ST., MM  
 Jabatan : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Tengah


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua,   
 Heru Bramoro, ST., MM

Pihak Pertama,   
 Riana Octaria Fasha, S.Pd, M.Pd

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2021**

**PERJANJIAN KINERJA 2021**  
**ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**  
**PADA DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA SUBBIDANG SARANA INDONESIA TENGAH**  
**PADA ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur Kepemudaan	Jumlah Lembaga Penerima Bantuan Sarana wilayah Indonesia Tengah dalam Pemanfaatan Sarana Kepemudaan	23 Lembaga

Jakarta, Maret 2021

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Tengah   
 Heru Bramoro, ST., MM

Kepala Subbidang Sarana Indonesia Tengah   
 Riana Octaria Fasha, S.Pd, M.Pd

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2021**



**PERJANJIAN KINERJA 2021**  
**ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**  
**PADA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riswan, S.E., M.M  
 Jabatan : Kepala Subbidang Prasarana Indonesia Barat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasan Nawawi, S.H  
 Jabatan : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,  
   
 Hasan Nawawi, S.H Riswan, S.E., M.M

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2021**

**PERJANJIAN KINERJA 2021**  
**ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR**  
**PEMUDA PADA DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA SUBBIDANG PRASARANA INDONESIA BARAT**  
**PADA ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur Kepemudaan	Jumlah Lembaga Penerima Bantuan Prasarana wilayah Indonesia Barat dalam Pemanfaatan Prasarana Kepemudaan	10 Lembaga

Jakarta, Maret 2021

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Barat Kepala Subbidang Prasarana Indonesia Barat  
   
 Hasan Nawawi, S.H Riswan, S.E., M.M

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2021**

**PERJANJIAN KINERJA 2021**  
**ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**  
**PADA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indro Prasetyo, ST, MT  
 Jabatan : Kepala Subbidang Sarana Indonesia Barat

selanjutnya disebut pihak pertama



Nama : Hasan Nawawi, S.H  
 Jabatan : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,  
   
 Hasan Nawawi, S.H Indro Prasetyo, ST, MT

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2021**

**PERJANJIAN KINERJA 2021**  
**ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**  
**PADA DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA SUBBIDANG SARANA INDONESIA BARAT**  
**PADA ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur Kepemudaan	Jumlah Lembaga Penerima Bantuan Sarana wilayah Indonesia Barat dalam Pemanfaatan Sarana Kepemudaan	27 Lembaga

Jakarta, Maret 2021

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Barat Kepala Subbidang Sarana Indonesia Barat  
   
 Hasan Nawawi, S.H Indro Prasetyo, ST, MT

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2021**

RENCANA AKSI PELAYANAN KEGIATAN KEMENPORA TAHUN 2021

Unit Kerja : Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KODE KOMPONEN	NAMA KOMPONEN/ KEGIATAN	TARGET		RENCANA AKSI	DATA PENDUKUNG	KETERANGAN
						INDIKATOR KEBERHASILAN	WAKTU PENYELESAIAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur pemuda serta tersusunnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Kepemudaan	Jumlah kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Kepemudaan yang tersusun	2 dokumen	3818.AFA.001.051	Penyiapan Bahan, Identifikasi, dan Dukungan Penyusunan Kebijakan	Tersusunnya Daftar Isian Masalah	Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>B06 : Koordinasi dengan Pihak Terkait</li> <li>B07 : Melaksanakan Forum Group Discussion (FGD)</li> </ul>	Notulen Rapat, Bahan Standardisasi	Rp418.201.000
				3818.AFA.001.052	Penyusunan Kebijakan Standardisasi Bidang Kepemudaan	Tersusunnya Draft Standardisasi	November 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>B06 : Koordinasi dengan tim ahli dan Lintas Instansi</li> <li>B07 : Pembahasan Daftar Isian Masalah</li> <li>B08 : Penyusunan Draft Standardisasi</li> <li>B09 : Rapat Internal Draft Standardisasi</li> <li>B10 : FGD pembahasan draft standardisasi</li> <li>B11 : Finalisasi draft standardisasi</li> </ul>	Dokumentasi Kegiatan, Laporan Hasil FGD	Rp765.315.000
				3818.AFA.001.055	Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan	Tersampaikan informasi kebijakan di Pusat dan Daerah	November 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>B10 : Sosialisasi Kebijakan di Pusat/ Instansi lain yang Terkait</li> <li>B11 : Sosialisasi Kebijakan di Daerah</li> </ul>	Dokumentasi Kegiatan	Rp623.318.000
	Jumlah Lembaga Penerima Bantuan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan	93 Lembaga	3818.BEI.001.051	Koordinasi dan Seleksi Penerima Bantuan	Terlaksananya Seleksi Administrasi Bantuan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	November 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>B05 : Penerimaan Proposal Dan Sosialisasi, Pembentukan Tim Seleksi</li> <li>B06-B11 : Usulan Penetapan Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana</li> </ul>	Notulen, Laporan Verifikasi, Berita Acara Seleksi, Dokumentasi Sosialisasi	Rp1.182.633.000	
			3818.BEI.001.055	Penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Tersalurkannya Bantuan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	November 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>B06 - B11: Penetapan Penerima Bantuan Dan Penyaluran Bantuan</li> </ul>	SK Penetapan, Perjanjian Kerja Sama, Dokumentasi Kegiatan	Rp10.071.402.000	
			3818.BEI.001.056	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>B06 -B12: Pelaksanaan Monitoring Penerima Bantuan dan Pengumpulan Laporan Pertanggung Jawaban Penerima Bantuan</li> <li>B12 : Evaluasi Kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana</li> </ul>	Laporan Monitoring, Laporan Pertanggungjawaban	Rp1.108.426.000	
	Koordinasi Para Pemangku Kepentingan Bidang Standardisasi serta Sarana dan Prasarana Kepemudaan	34 Provinsi	3818.AEA.001.051	Rapat Koordinasi dengan Stakeholder Bidang Standardisasi Kepemudaan	Tersedianya data Sarana dan Prasarana Kepemudaan	November 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>B06 : Rapat internal Persiapan</li> <li>B07 : Koordinasi dengan stakeholder terkait</li> <li>B08 - B09 :Pendataan daftar sarana dan prasarana</li> <li>B10 : Survey dan monitoring data sarana dan prasarana yang ada</li> <li>B11 : Kajian terhadap daftar sarana dan prasarana</li> </ul>	Notulen Rapat, Dokumentasi Kegiatan, Data Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Rp469.026.000	
			3818.AEA.001.052	Pelaporan Hasil Koordinasi dan Pengawasan Pelaksanaan Program Pengembangan Standardisasi Kepemudaan	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan program standardisasi kepemudaan	Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>B11 : Monitoring ke Pihak terkait</li> <li>B12 : Evaluasi dan Laporan hasil monitoring</li> </ul>	Laporan	Rp361.679.000	

